

**KAMBOJA MENDUKUNG TIMOR LESTE SEJAK 1 DEKADE DALAM UPAYA
BERGABUNG DENGAN ASEAN**

Azizah¹, Wendy Aulia Putri², Elfika Pakpahan³, Fatonah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jambi

azizahzahpintastuo@gmail.com¹, wendyauliaputri17@gmail.com², elvikapakpahan@gmail.com³,
fatonah.nurdin@unja.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk mengetahui lebih dalam Mengenai Kamboja Mendukung Timor Leste Sejak 1 Dekade Dalam Upaya Bergabung Dengan ASEAN. Mengetahui dan mengerti akanawal mula dukungan yang diberikan Kamboja kepada Timur Leste, bagaimana kontinuitas dukungan, dan manfaat bergabungnya Timor Leste dengan ASEAN. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian sejarah atau historis yang meliputi empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kamboja merupakan sebuah Negara yang berada dalam cakupan Asia Tenggara, tepatnya di bagian Selatan Semenanjung Indocina.Kamboja merupakan salah satu Negara yang menyuarakan dukungan terhadap Negara Timor Leste untuk bisa bergabung menjadi anggota ASEAN. Simpulannya, dukungan Kamboja terhadap Timor Leste dalam upayanya untuk bergabung dengan ASEAN selama satu dekade menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integrasi regional dan solidaritas antar negara Asia Tenggara.

Kata Kunci: Kamboja, Timor Leste, Dukungan, ASEAN, Keanggotaan.

Abstract

This research was conducted in an effort to find out more about Cambodia supporting Timor Leste since 1 decade in its efforts to join ASEAN. Know and understand the beginning of the support provided by Cambodia to East Leste, the continuity of support, and the benefits of Timor Leste joining ASEAN. The research method we use is a historical or historical research method which includes four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography. Cambodia is a country located in Southeast Asia, specifically in the southern

part of the Indochina Peninsula. Cambodia is one of the countries that has voiced support for Timor Leste to join as a member of ASEAN. In conclusion, Cambodia's support for Timor Leste in its efforts to join ASEAN for a decade shows a strong commitment to regional integration and solidarity between Southeast Asian countries.

Keywords: Cambodia, Timor Leste, Support, ASEAN, Membership.

PENDAHULUAN

Indocina merupakan suatu sebutan bagi negara-negara yang dipengaruhi oleh budaya India dan negara China yang diterapkan oleh Prancis di negara-negara jajahannya. Istilah Indochina muncul pada awal abad ke-19 yang diketahui dibawa oleh Geografer Den Mark dan Conrad Malte yang berasal dari Prancis. Diketahui bahwa wilayah Indocina antara lain Vietnam, Kamboja, Laos Thailand, Myanmar dan Malaysia.(Syidad, 2023) Adapun penamaan Indochina juga dikarenakan posisi geografis serta budaya di wilayah yang terletak diantara dua peradaban besar. Diketahui peradaban India berada di sebelah Barat negara- negara Indochina, yang mana di peradaban India tersebut terletak di subkontinen India di wilayah modern India, Pakistan, serta Bangladesh di masa sebelumnya negara seperti India, Pakistan, serta Bangladesh dikenal dengan sebutan India Britania Raya atau bisa juga dikenal dengan British India, adapun nama lain dari negara India, Pakistan, serta Bangladesh dikenal dengan sebutan Hindustan tepatnya di masa adanya kekaisaran Mughal dalam bidang sejarah serta budaya. (Lubis, Muhajir and Zaini Dahlan, 2021)

Dari adanya peradaban ini, kemudian memperkenalkan kebudayaan yang beragam baik dalam sistem kepercayaan, seni, serta ilmu pengetahuan yang pada masanya mempengaruhi wilayah Asia tenggara serta Indochina. Dalam bidang kepercayaan dan seni khususnya di Kamboja dan Vietnam diketahui beragama Hindu dan Budha, kepercayaan awal seperti animisme dengan pemujaan nenek moyang juga masih diterapkan.(Syidad, 2023) Terdapat akulturasi dalam upacara pemujaan roh nenek moyang yang mana terdapat penggabungan pemujaan dengan praktik Hindu Budha,Raja dianggap sebagai dewa karena merupakan inkarnasi dewa (Devaraja). Banyak candi seperti Angkor Wat yang mana mencerminkan pengaruh India di dalam seni serta arsitektur. Pengaruh peradaban India juga bisa diketahui dengan adanya pengenalan sistem pendidikan yang telah terstruktur, dengan mulainya diajarkan agama dan filsafat. Dengan adanya penemuan prasasti yang mana menggunakan

bahasa Sansekerta. Selanjutnya, terdapat hierarki sosial serta tatanan kehidupan sehari-hari berasal dari India yang mana telah mempengaruhi pola sosial dalam masyarakat. Di sisi lain terdapat peradaban Tiongkok yang berada di sebelah utara di negara-negara yang ada di Indocina. Tentunya peradaban Tiongkok ini membawa pengaruh terhadap negara-negara yang ada di Indocina baik dalam bahasa, sistem pemerintahan, serta budaya. Di dalam bahasa, contohnya di negara Vietnam dan Kamboja dapat dilihat dari banyaknya kosakata dari bahasa Khammer serta Vietnam yang diadopsi dari bahasa Tionghoa. (Akbar *et al.*, 2024)

Dalam bidang pemerintahan, khususnya pada masa era Khammer Merah yang mana Tiongkok mendukung perpolitikan serta militer dalam membantu rezim PolPot melawan Vietnam, hal tersebut selanjutnya membuat Kamboja menggunakan reformasi ekonomi dan kebijakan pasar bebas seperti Tiongkok dan memperkuat hubungan bilateral, bukan hanya itu terdapat pembangunan infrastruktur politik di Vietnam, pengaruh peradaban Tiongkok nampak dalam pemerintahan yang feodal serta birokrasi seperti sistem yang diterapkan di Tiongkok. Adanya confusionisme mempengaruhi sistem nilai dan kebijakan pemerintah. (Arafat, 2023) Laos juga dipengaruhi dengan adanya peradaban Tiongkok dalam sistem pemerintahannya di mana mereka menggunakan sistem monarki, pada masa itu raja Sisavanfong sebagai pemimpin simbolis, padahal kekuasaan yang sebenarnya berada di bawah pemerintahan pejabat Perancis. Adanya pengakuan kedaulatan Laos oleh Prancis setelah permasalahan Siam menunjukkan pengaruh Tiongkok dalam politik regional di Laos. Hal ini juga memperkuat dengan adanya intervensi militer seperti adanya tentara Bendera Hitam di akhir abad ke-19. (Khotimah and Yuliati, 2022)

Tentara Bendera Hitam merupakan pejuang yang menolak adanya dominasi Prancis serta menggaungkan untuk kemerdekaan. Dalam menunjukkan perlawanan, mereka sering kali melakukan gerilya serta penyerangan kepada pasukan colonial. Selain beberapa pengaruh sebelumnya, dalam bidang budaya juga dipengaruhi oleh peradaban Tiongkok. Misalnya di Laos dengan agama Buddhismenya juga dipengaruhi dengan praktik spiritual serta filosofi yang diadopsi dari Konfusianisme dan Taoisme. (Putro, 2014) Dalam arsitektur, seperti kuil dan bangunan tradisional digunakan elemen desain seperti di Tiongkok. Tradisi tahun baru yang dirayakan juga merupakan akulturasi dari budaya Laos dan Tiongkok di negara Vietnam dapat dilihat pengaruh peradaban Tiongkok seperti dalam tradisi agama toisme dan konfusianisme yang mana agama Vietnam adalah Budha terdapat bangunan suci serta monumental contohnya

pagoda 2 mod di Hanoi, dalam tarian lain dance muaron dan dragon botress semua dengan gerakan pada dansa Tiongkok titik di negara Kamboja, dengan adanya komunitas tionghoachio telah membawa serta menyebarkan budayanya.(Hidayatti, 2020)

Sama halnya dengan merayakan festival seperti tahun Baru Imlek seni musik erhu dan sitar juga diperkenalkan di Kamboja.Tepatnya pada masa kolonialisme Prancis, wilayah-wilayah Vietnam, Kamboja, serta Laos digabungkan menjadi satu kesatuan administratif yang mana pada kala itu dikenal dengan Indochina Prancis (1887-1954). Dan pada akhir penjajahan Prancis tepatnya tahun 1954 kawasan-kawasan kesatuan administratif tersebut masih dikatakan sebagai sebutan dengan istilah Indochina.(Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)Negara Kamboja merupakan salah satu Negara yang menjadi wilayah jajahan Prancis dan termasuk kedalam kesatuan administratif Indochina. Pada awalnya, Kamboja merupakan sebuah kerajaan yang pada masanya bernama kerajaan Funan yang mana berdiri di abad ke-1 hingga ke-2 M, serta terdapat kerajaan Chenla yang berdiri di abad ke-6.(Funan, Sejarah and Hall, 2022) Diketahui bahwa kedua kerajaan tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Budha yang amat sangat kental, dan memiliki hubungan perdagangan dengan Negara-negara yang ada di Asia Tenggara.

Tepatnya dia abad ke-9, seorang Raja bernama Jayawarman II mendirikan kerajaan Khmer yang berpusat di Angkor. Pada masanya kerajaan ini merasakan puncak kejayaannya di abad ke-11 dan ke-12, hal tersebut ditandai dengan dibangunnya candi-candi bernuansa megah, contohnya Angkor Wat. Didalam perjalanan kerajaan-kerajaan tersebut, tepatnya pada tahun 1431 di kerajaan Khmer yang mana diketahui berpusat di Angkor ditaklukan oleh Kerajaan Ayutthaya (siam), hal ini dipicu dengan adanya invasi yang mereka lakukan di Kamboja.Akibat dari penaklukan ini, pusat kota Khmer yang berada di Angkor seketika di pindahkan ke Lovek yang mana menjadi ibu kota baru bagi Kamboja. Didalam tiga tahun berikutnya, Kamboja diketahui mengalami pengaruh serta di control oleh Siam dan Vietnam secara bergilir, hal tersebut mengakibatkan Kamboja mengalami banyak kerugian baik dalam wilayah serta dalam kekuatan politik dan juga ekonomi. Menghadapi situasi tersebut Raja Norodom I yang mana merupakan Raja yang dilantik oleh Siam, diam-diam meminta perlindungan kepada Prancis, tepatnya di tahun 1863.(Budiana, 2013)

Hal tersebut di sambut baik oleh Prancis dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian yang akhirnya Kamboja resmi menjadi Protektorat Prancis. Kamboja berada di

bawah jajahan Prancis yang mana dalam penerapannya, terdapat perubahan-perubahan yang sangat signifikan baik dalam struktur social dan juga ekonomi, serta diperkenalkan sistem administrasi colonial yang pada masanya dapat mengubah cara pandang pemerintahan tradisional yang kemudian merugikan rakyat Kamboja.(Aminatus Sholeha and Erasiah, 2024)Dimasa penjajahan Prancis ini, banyak masyarakat local yang mengalami ketidaklayakan dalam kehidupan seperti penindasan yang genjar dilakukan dan pengeksploitasian sumber daya alam yang kian meningkat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan colonial. Tepatnya pada peristiwa Perang Dunia II ditahun 1940-1945, Jepang berhasil menguasai Kamboja. Tetapi penyerahan Jepang pada tahun 1945, mengembalikan Kamboja berada di posisi yang kembali dibawah control Prancis. Hal tersebut membuat rakyat Kamboja menggaungkan semangat nasionalisme, Raja Norodom Sihanouk mulai membentuk organisasi-organisasi kemerdekaan, contohnya Front Persatuan Nasional Kamboja.(Budiana, 2013)

Mereka juga melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan dari Negara-negara lain dalam memperkuat Kamboja yang melakukan negosiasi dengan pihak Prancis. Akhirnya pada tahun 1953 di bulan Agustus, dengan berbagai bentuk negosiasi yang dilancarkan. Prancis akhirnya memberikan otonomi kepada Kamboja, beberapa bulan kemudian Raja Sihanouk mulai memproklamakan kemerdekaan Kamboja dari penjajahan Prancis.(Budiana, 2013)Didalam perjalanan sejarah dan perjuangannya yang panjang serta amat sangat menantang, di ketahui Kamboja merupakan salah satu Negara yang menyuarakan dukungan terhadap Negara Timor Leste untuk bisa bergabung menjadi anggota ASEAN. Diketahui bahwa ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang mana merupakan suatu organisasi geopolitik dan ekonomi. Tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967, untuk dapat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, social, dan politik antara para anggotanya.(Indrawan, 2021)

Kamboja memberikan dukungannya kepada Timor Leste dengan kontinuitasnya yang kuat, tepatnya disaat Perdana Menteri Hun Sen dalam pidatonya pada KTT ASEAN ke-18.(Galateya, Alchatib and Damayanti, 2023) Beliau menyatakan, Timor Leste berada di dalam kawasan Asia Tenggara yang sudah seharusnya bergabung kedalam ASEAN. Dukungan tersebut juga berlanjut ketika Kamboja menjadi ketua ASEAN di tahun 2012, dengan menguatkan hubungan bilateral dan berkolaborasi dalam isu-isu regional. Di tahun 2023, komitmen dukungan terus berlanjut dalam mendukung Timor Leste untuk memenuhi syarat-syarat keanggotaan penuh.Dengan bergabungnya Timor Leste dengan ASEAN membawa banyak manfaat seperti memberikan akses ke pasar yang lebih luas dengan berbagi mitra

dagang ASEAN. Investasi asing juga sangat dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta dalam sector lainnya. Dan yang paling penting, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, dengan mengembangkan sumber daya manusia.

METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini, pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) penulis juga memakai metode penelitian sejarah atau historis yang mencakup empat tahap, antara lain heuristic, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi(Sukmana, 2021). Langkah awal yang dilakukan dalam metode sejarah, yaitu heuristic atau pengumpulan sumber-sumber data yang sesuai atau relevan sesuai dengan judul yang akan ditulis. Penulis dianjurkan mengumpulkan sumber sebanyak- banyaknya. Dalam mengumpulkan sumber diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di masa globalisasi yang semakin berkembang, lewat perpustakaan juga media elektronik mempermudah pengumpulan sumber-sumber yang relevan.

Pada tahap kritik sumber, tidak hanya mengumpulkan perlu dilakukan kritik atau dikomparasikan mana sumber-sumber yang memungkinkan relevan dengan judul yang diteliti. Setelah dilakukan kritik sumber, kemudian penulis membandingkan atau memadankan antara satu data dengan data yang lain. Tahap selanjutnya yaitu interpretasi, suatu kegiatan menginterpretasi, lalu menghubungkan sumber satu dengan sumber relevan lainnya yang telah didapati. Jika dirasa sudah relevan, berikutnya adalah tahap penulisan ulang atau merekonstruksi disebut dengan tahap historiografi. Historiografi adalah tahap menyusun kembali peristiwa sejarah yang sedang diteliti oleh penulis dengan hasil yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kamboja: Geografi, Sejarah, dan Budaya

Kamboja merupakan sebuah Negara yang berada dalam cakupan Asia Tenggara, tepatnya di bagian Selatan Semenanjung Indocina. Berbatasan dengan Thailand tepatnya dibagian Barat dan Barat Laut, berbatasan dengan Laos tepatnya di Utara, berbatasan dengan Vietnam tepatnya di Timur dan Tenggara, dan berbatasan dengan laut China Selatan tepatnya di Selatan. Diperkirakan Negara ini mempunyai luas sekitar 181.035 km² yang mana sebagian besar wilayah tersebut berdiri dari adanya dataran rendah serta terdapat pegunungan.(Muslim-thai,

2022) Pegunungan tersebut antara lain pegunungan Cardamon (Cardamon Mountains) yang ada di Barat Daya Kamboja, dengan terbentang dari Provinsi Koh Kong hingga Pursat dengan ketinggian sekitar 1.813 mdpl tepatnya di Gunung Phnom Aural. Yang kedua, pegunungan Dangrek yang berada di perbatasan antara Kamboja dengan Thailand dengan ketinggian sekitar 525 mdpl, dan terdapat Candi Preah Vihear yang merupakan situs bersejarah.

Yang ketiga, Gunung Phnom Kulen yang berada di Provinsi Siem Reap, dengan ketinggian mencapai 487 mdpl. Yang selanjutnya Gunung Phnom Samkos yang berada di Pegunungan Cardamon dengan ketinggian mencapai 1.717 mdpl.(Lestari, 2009) Kamboja merupakan suatu Negara yang dihadiri oleh adanya keberadaan Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Diketahui bahwa Sungai Mekong merupakan salah satu sungai yang memiliki kepanjangan sekitar 4.350 km yang membuatnya menjadi salah satu sungai terpanjang di dunia, yang mana mengalir dari Tibet, China, Laos, Kamboja, dan Vietnam, lalu bermuara di Laut China. Masyarakat setempat bergantung pada Sungai Mekong yang menyediakan berbagai spesies ikan sebagai sumber mata pencaharian, pertanian, dan transportasi.(Rahmayana, Enawaty and Hadi, 2021) Danau Tonle Sap terletak di kota Siem Reap, Kamboja, mempunyai ukuran mencapai 2.700 km² dan bertambah besar jika berada dalam musim hujan mencapai 16.000 km². Jika musim hujan, danau ini dialiri oleh Sungai Mekong, tetapi jika musim kemarau aliran berbalik ke Sungai Mekong. Danau ini juga telah ditetapkan UNESCO sebagai biosfer pada tahun 1997 dengan beragamnya keanekaragaman hayati (berbagai spesies ikan dan burung).(Budiana, 2013)

Negara Kamboja dikenal dengan pemerintahan monarki konstitusional, yang mana kita ketahui kepala Negara di jabat oleh seorang raja dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Dimata masyarakat Raja merupakan symbol persatuan dan keabadian dalam sebuah Negara, mereka bisa menjabat sampai menutup mata untuk selamanya. Setelah Raja sebelumnya meninggal dunia, para komisi takhta kerajaan akan melakukan pemilihan Raja baru. Diketahui bahwa, komisi takhta akan bertanggung jawab dalam pemilihan raja baru yang mana maksimalnya setelah 7 hari sepeninggalan atau pengunduran diri dari Raja sebelumnya.(Budiana, 2013) Komisi takhta beranggotakan dari pejabat tinggi presiden senat, presiden majelis nasional, perdana menteri, dan pemimpin biksu yang ada di Budha. Mereka akan memilih calon raja yang layak, karena merekalah yang berperan menjaga keberlangsungan monarki dan stabilitas politik di Kamboja, khususnya setelah adanya berbagai konflik dimasa

lalu. Serta menjadi suatu lembaga yang bisa memastikan proses suksesi takhta berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan konstitusi Kamboja.

Terdapat pula penerapan sistem trias politica, yang mana berfugsi untuk pembagian kekuasaan antara 3 cabang dalam pemerintahan yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif. (Daffa, Putri and Ambarwati, no date) Dalam cabang eksekutif, Raja bukan hanya sebagai kepala Negara tetapi juga merupakan bentuk simbolis dalam kehidupan, dan merupakan panglima tertinggi dalam angkatan bersenjata. Pengangkatan Perdana Menteri merupakan saran dari Majelis Nasional untuk Raja, Perdana Menteri juga memimpin pemerintahan serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan public dan pengelolaan keuangan Negara, bukan hanya itu Perdana Menteri juga akan mengawasi cabinet dari menteri-menteri yang telah mengelola berbagai sector yang ada dalam pemerintahan. Dalam cabang legislative, terdapat sistem legislative unibameral yang mana berdiri dari Majelis Nasional yang dipilih sesuai ketentuan pemilihan umum. Adapun tugas dari Majelis Nasional ini antara lain membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi kinerja pemerintah. Undang-undang yang sudah dibuat biasanya akan mendapatkan masukan dari senat yang beranggotakan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat yang telah dipilih oleh Raja.

Dalam cabang yudikatif, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi yang mana memiliki kewenangan serta menafsirkan undang-undang, menyelesaikan sengketa dalam hokum, serta dapat membatalkan peraturan pemerintahan yang mulai bertentangan dengan konstitusi. Dengan mengetahui hal tersebut, tersirat aksi dalam menjegal konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan serta dapat memastikan adanya checks and balances antara ketiga cabang pemerintahan. Tetapi sistem trias politica ini mempunyai dampak terhadap kebijakan public serta dalam dinamika di Negara ini. Adanya dominasi Perdana Menteri Hun Sen yang besar, memungkinkannya mengimplementasikan kebijakan tanpa adanya pengawasan dari legislative. Dengan adanya pengambilan keputusan yang cepat akan tetapi mengabaikan masukan dari pihak lain seperti oposisi dan masyarakat sipil. Didalam legislative pun terdapat partai yang berkuasa, Partai Rapat Kamboja (CPP) yang mana telah mendominasi Majelis Nasional. Pihak oposisi bisa menjadi lemah serta kurang mampu untuk mempengaruhi kebijakan public secara signifikan. Akibatnya bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.

Walaupun terdapat Mahkamah Agung dengan tanggung jawabnya menafsirkan Undang-

undang serta menjaga konstitusi, tetapi dalam praktiknya dan independensinya seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Kemampuan yudikatif pun terbatas dalam menegakan hukum dan hak asasi manusia dengan efektif, akhirnya menyebabkan implementasi kebijakan public yang tidak adil serta tidak merata. Diketahui bahwa struktur social yang ada di Kamboja masih bersifat patron-client yang dapat menghambat perkembangan budaya demokrasi yang sehat dan baik. (Aminatus Sholeha and Erasiah, 2024) Hal ini ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang bergantung kepada elit politik untuk mendapatkan dukungan serta akses dalam sumber daya, dengan ini bisa mengurangi partisipasi aktif dalam proses politik serta pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sistem trias politica di Kamboja menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kekuasaan yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam kebijakan public serta pembangunan demokrasi di Negara ini.

Masyarakat Kamboja sebagian besar terdiri dari para petani serta penduduk desa yang terikat dalam sistem tradisional, cenderung hierarkis karena dipengaruhi hubungan patron-client. Hubungan antar individu berdasar dari patronase, para petani bergantung pada individu yang memiliki kuasa yang kuat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan akses ke pasar, mendapatkan modal, dan memanfaatkan teknologi pertanian. Dengan adanya ketergantungan terhadap patron bisa membatasi mobilitas social dan dapat menciptakan kesenjangan antara mereka yang dekat dengan patron dan bagi mereka yang tidak dekat dengan patron. Tetapi, dengan adanya peningkatan pendidikan serta urbanisasi yang mulai menuntut akan transparansi serta akuntabilitas dari para patron, mulai terjadi perubahan dalam patronase. Adanya dominasi agama Buddha Theravada mempengaruhi nilai-nilai social serta norma yang berlaku dalam perilaku masyarakat. (Kasetsiri, 2013) Mereka kerap merayakan upacara-upacara dalam menghormati leluhur serta memperingati tahun baru khmer dalam merayakan warisan budaya mereka.

Mata pencaharian Kamboja sebagian besar menjadi tulang punggung adalah dalam sector pertanian, padi merupakan komoditas utama dan terdapat pula tanaman komersial seperti karet, kapas, jagung, serta tembakau. Dalam sector industri, berkecimpung dalam manufaktur tekstil dan alas kaki, dalam konstruksi, dan layanan, dan juga yang membuatnya dikenal sebagai pusat produksi pakaian global. Dalam sector jasa, pariwisata mendorong kemajuan dengan banyaknya kunjungan dari wisatawan internasional yang terus meningkat, dan menciptakan lapangan kerja serta mendukung sector transportasi, perhotelan, dan perdagangan. (Rahayu *et*

al., 2024) Dalam sistem ekonomi ini, Kamboja juga mengalami berbagai tantangan dengan adanya kondisi politik yang tidak stabil yang diwarnai dengan kudeta serta konflik internal, banyaknya ketimpangan antara kota dan pedesaan, keterbatasan infrastruktur dalam jaringan jalan serta keterbatasan air dan listrik, produktivitas pekerja yang rendah, korupsi berkepanjangan yang mengakibatkan investasi terhalang, dan bergantung pada tekstil dan garmen yang rentan akan flutasi permintaan global. Untuk mencapai stabilitas serta inklusi ekonomi yang baik, maka Kamboja harus melakukan kampanye anti korupsi, membangun infrastruktur yang lebih maju, dan pentingnya diversifikasi industri.

Profil Timor Leste: Sejarah, Identitas, dan Aspirasi

Timor Leste merupakan sebuah Negara yang memiliki sejarah yang panjang dengan melibatkan berbagai penjajahan terhadapnya. Awal mula bentuk penjajahan di Timor Leste dipegang oleh Portugis, tepatnya pada abad ke-15. Mereka awalnya melakukan perdagangan dengan masyarakat setempat, tetapi pada akhirnya Timor Leste ditetapkan sebagai koloni Timor Portugis. Dalam pengkolonial Timor Leste oleh Portugis, terjadi persaingan antara Portugis dengan Belanda yang juga ingin menguasai wilayah Timor Leste. Dahulunya Portugis telah menguasai bagian timur pulau, dan Belanda telah menguasai bagian barat yaitu Hindia Belanda. Diketahui pada tahun 1851, Gubernur Portugis yang ada di Dili yaitu Lima de Lopes telah melakukan kesepakatan dengan pihak Belanda tentang demarkasi batas persetujuan dari pemerintahan pusat di Lisbon. (Leite, 2007) Dengan ini lah kemudian menyebabkan ketegangan serta ketidakpuasan terhadap kalangan otoritas Portugis. Dengan mengetahui tindakan Gubernur yang dianggap tidak sah, Portugal ingin melakukan perundingan untuk melakukan perjanjian resmi.

Tepatnya pada 20 April 1859 perwakilan Raja Pedro V dari Portugal yaitu Antonio Maria de Fontes Pereira de Melo dan perwakilan dari Raja William III dari Belanda yaitu Jan Heldeweir, meresmikan perjanjian dengan penandatanganan Perjanjian Lisboa (Perjanjian Lisbon). (Mahendra, Yuniarti Rusadi and Dzakiruddin, 2022) Di dalam perjanjian ini telah menetapkan batas-batas antara Timor Portugis dan Timor Belanda, wilayah Timur Pulau Timor dikuasai oleh Portugal, dan mengambil alih wilayah Oecusse Ambeno dengan menjadikannya sebagai ekslave dari Timor Portugis. Sedangkan wilayah bagian barat di kuasai oleh Belanda, dengan adanya perjanjian ini telah mengurangi ketegangan antara keduanya serta telah

memberikan stabilitas di wilayah tersebut. Sebagai wilayah koloni, Timor Leste memiliki pemerintahan yang diatur dan ditunjuk langsung oleh Portugal. Seperti pemindahan ibu kota dari Lifau ke Dili. Dalam mempengaruhi budaya, Portugis membawa serta agama Katolik untuk diperkenalkan ke masyarakat, menegakan sistem pendidikan formal dengan menjadikan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi di dalam administrasi yang mana berdampak juga dengan bahasa local seperti tetun.

Menghadapi pemerintahan dan segala kegiatan yang diatur oleh pihak Portugis, masyarakat Timor Leste melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Manufahi. (Leite, 2007) Menghadapi pemberontakan yang kian menajam Portugis menindaki dengan keras yang menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuh. Perlu diketahui bahwa Timor Leste juga pernah berada di bawah kekuasaan Jepang, tepatnya pada 20 Februari 1942 yang mana mereka melakukan invansi dalam strategi Perang Dunia II. Dengan serangan mendadak Jepang berhasil menduduki Timor Leste, awalnya Timor Leste menunjukkan perlawanan terhadap Jepang. Tetapi, Jepang yang memiliki superior dengan taktik militer yang kuat membuat mereka bisa berkuasa. Kekuasaan mereka bisa dilihat dari adanya langkah mengendalikan masyarakat yang ditahan dalam kamp konsentrasi di Liquica dan Maubara, serta banyak masyarakat yang mengalami kekurangan makanan serta layanan kesehatan yang tidak memadai.

Masyarakat local juga di paksa dalam memekerjakan proyek-proyek militer Jepang, yang tadinya terdapat sistem pendidikan colonial beralih dan dihapuskan, yang diajarkan Cuma bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar. Banyak penduduk yang meninggal karena kelaparan serta kekerasan yang dilakukan oleh Jepang. Tetapi, diakhir Perang Dunia II tepatnya di tahun 1945 yang mana Jepang menyerah kepada sekutu setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. (Narawaty, 2023) Dengan penyerahan ini terjadi kekosongan kekuasaan di Timur Leste, Portugis pun berusaha mengembalikan kendalinya kepada Timor Leste. Akhirnya Portugis resmi kembali menguasai Timor Leste, tetapi dengan adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh Jepang ketika menduduki Timor Leste telah membuat masyarakat memiliki ketidakpuasan. Dan tepatnya pada tahun 1974, telah berlangsung revolusi Anyelir yang berdampak besar kepada kebijakan colonial Portugis, Timor Leste mulai membuka jalan dekolonisasi. Portugal yang telah berubah politiknya memunculkan berbagai partai yang ada di Timor Leste. (Syahbuddin, 2020) Partai tersebut antara lain Uni Demokrasi Timur (UDT),

dengan mendukung kemerdekaan secara bertahap serta berusaha mempertahankan hubungan dengan Portugal.

Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente), menginginkan tersegeranya kemerdekaan untuk Timor Leste. Selanjutnya, Apodeti (Associação Popular Democrática Timorese), menginginkan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Dengan adanya beberapa partai di Timor Leste, telah menyebabkan ketegangan seperti yang pro kemerdekaan dari Fretilin dan partai lainnya yang mendukung integrasi dengan Indonesia seperti UDT. Tepatnya pada Agustus 1975, pecahlah perang saudara antara Fretilin dan UDT, kekosongan kekuasaan pun berlangsung. Dengan ini Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste dari Portugal di bulan November 1975. Secara de facto mereka telah menguasai wilayah Timor Leste, tetapi Fretilin ingin diakui secara internasional. Perlu diketahui bahwa Fretilin (11 September 1974) dahulunya adalah partai yang dikenal dengan Associação Social Democrática Timorese (ASDT), mengadopsi ideology sosialisme demokratis dan nasionalisme sayap kiri, awalnya Marxisme-Leninisme. Dengan tujuan mencapai kemerdekaan penuh bagi Timor Leste tanpa bergantung dengan Negara lain, dan dapat memperjuangkan hak dan nasib sendiri bagi rakyat Timor Leste. Dengan adanya kudeta Portugis yang memunculkan Fretilin yang berhaluan kiri, Indonesia yang kala itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengkhawatirkan akan adanya penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Indonesia sadar bahwa Fretilin merupakan ancaman yang bisa memicu gejolak politik di dalam Negeri dan di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia akhirnya melakukan invansi ke Timor Leste yang mana dikenal dengan Operasi Seroja yang dimulai tahun 1975.(Hijriani, 2010) Para pemeimpin militer Indonesia seperti Mayor Jenderal Ali Murtopo segera mendorong aneksasi Timor Leste sebagai bagian dari strategi nasional yang dilancarkan untuk memperkuat keamanan serta stabilitas regional. Hal ini disambut baik dan mendapatkan dukungan diplomatic serta material dari Amerika Serikat dan Australia, yang mana mereka memiliki kepentingan dalam mencegah pengaruh komunis. Mereka menyediakan senjata dan memberikan dukungan-dukungan intelijen selama invansi. Operasi Seroja ini berlangsung sampai tahun 1978, diawali dengan serangan besar-besaran yang diperlihatkan adanya bombardier yang berasal dari kapal perang TNI Angkatan Laut serta penyerbuan pasukan udara, pasukan lintas udara dan mariner Indonesia mendarat di kota Dili yang kala itu merupakan ibu kota Timor Leste. Sekitar 641 pasukan terjun payung Indonesia

dikerahkan ke Dili, mereka bertempur sengit melawan Fretilin. Akhirnya Indonesia berhasil menguasai Kota, walaupun terdapat korban berjatuhan di kedua belah pihak.

Operasi dilanjutkan ke kota-kota lain seperti Baucau, yang mana pasukan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang telah berhasil menguasai wilayah-wilayah strategis serta memecah belahkan kekuatan Fretilin menjadi kelompok yang kecil. Banyak korban berjatuhan baik dari pihak Indonesia maupun warga sipil yang diperkirakan mencapai 100.000 hingga 180.000 orang yang tewas, bukan hanya tewas, banyak warga yang kelaparan hingga meninggal dunia. Hal ini membuat munculnya kecaman dari berbagai Negara dan PBB, tetapi dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat serta Australia telah memberikan legitimasi atas tindakan Indonesia di hadapan internasional. Tepatnya dikala pertempuran yang masih berlanjut di Lospalos, anggota TNI yang sudah berhari-hari mengepung anggota Fretilin akhirnya berhasil dengan menyerahnya anggota Fretilin yang berjumlah sekitar 3.000 orang. Hal ini menandakan kekalahan bagi Fretilin, dan menjadikan Timor Leste resmi diintegrasikan kedalam wilayah Indonesia. Selanjutnya Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 yang menyatakan Timor Timur menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. (Suartika, 2015)

Diketahui bahwa Timor Leste berada di bawah kekuasaan Indonesia selama 24 tahun, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti adanya kekerasan dan terror. Sekitar 200.000 hingga 250.000 orang dikatakan telah meninggal akibat perang, adanya pembunuhan massal, penyiksaan, menangkap secara sewenang-wenang kepada orang-orang yang diduga menentang pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang menerapkan kebijakan terror sistematis dalam menekan perlawanan terhadap pendudukan. Perempuan juga menjadi sasaran kekerasan seksual yang mana merupakan strategi militer dalam menakut-nakuti masyarakat, adanya penghancuran sumber daya pangan, dan terdapat peristiwa yang terkenal yaitu pembantaian Santa Cruz, yang mana pasukan Indonesia menembaki demonstrasi damai di Dili yang akhirnya menyebabkan kemarahan internasional serta meningkatkan kesadaran global tentang pelanggaran hak asasi manusia. Perlawanan-perlawanan dari masyarakat sipil juga ada, seperti Fretilin dan kelompok lain terus berjuang dalam mendapatkan kemerdekaan. Dengan berjalannya waktu dukungan internasional untuk Timor Leste semakin ditingkatkan, seperti di tahun 1999 telah diadakan referendum yang berada dalam pengawasan PBB dalam menentukan nasib Timor Leste.

Rakyat pun memilih untuk merdeka dari Indonesia, tetapi terdapat kelompok paramilter yang tidak setuju dan memicu kekerasan oleh milisi pro-Indonesia. Intervensi Pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan oleh PBB yang akhirnya dapat menghentikan kerusuhan dan dapat menjaga stabilitas wilayah, dan telah menandai akhir dari pendudukan Indonesia. (Risal, 2017) Dan pada tahun 2002, Timor Leste resmi menjadi sebuah Negara yang merdeka dengan adanya deklarasi kemerdekaan yang ditandatangani oleh Xanana Gusmao yang menjadi pemimpin kemerdekaan serta tokoh utama Fretilin yang akhirnya menjadi Presiden pertama di Timor Leste. Serta B.J. Habibie yang merupakan Presiden Indonesia yang telah memberikan opsi kepada rakyat dalam memilih merdeka.

Dukungan Kamboja terhadap Timor Leste dalam Proses Keanggotaan ASEAN

Setelah Timor Leste meraih kemerdekaannya pada 20 Mei 2002, negara ini menyatakan niatnya untuk bergabung dengan ASEAN sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan diri ke dalam komunitas regional. Dan pada tahun yang sama yaitu 2002 Timor Leste pun diberikan status pengamat di ASEAN dan ini merupakan langkah penting untuk partisipasi dalam kegiatan ASEAN dan menunjukkan komitmen Timor Leste terhadap prinsip-prinsip yang ada di ASEAN (Gede and Mangku, 2017). Timor Leste sendiri memiliki ekonomi yang masih dalam tahap pengembangan dan sangatlah bergantung dengan bantuan internasional sehingga dengan menjadi anggota ASEAN diharapkan mendapat peluang perdagangan dan investasi yang lebih baik serta mendapatkan akses yang lebih luas ke pasar di kawasan Asia tenggara. Jangan bergabung ke Asean juga dapat meningkatkan posisi diplomatik Timor Leste di kancah internasional, ini juga memberikan negara tersebut tempat untuk partisipasi dalam dialog dan kerjasama regional dan memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga di Asia tenggara.

ASEAN sendiri juga memiliki norma non intervensi yang kuat sehingga dapat memberikan rasa aman bagi Timor Leste dengan menjalankan kebijakan domestiknya tanpa tekanan dari negara-negara luar dan hal ini sangatlah penting karena sebagai negara yang baru merdeka mereka harus membangun identitas serta kedaulatan nasionalnya (Dupont, 2000). Untuk masuk ke Asean Timor Leste juga menghadapi beberapa tantangan untuk menjadi keanggotaan penuh ASEAN. Seperti mereka yang harus memenuhi berbagai kriteria yang ditetapkan oleh piagam ASEAN seperti dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik. Hal

itu mencakup pembangunan infrastruktur fisik seperti bandara internasional dan kantor perwakilan ASEAN. Untuk meningkatkan jumlah diplomat dan personel yang sesuai dengan standar kerja ASEAN. Dan Timor Leste yang saat itu masih membangun stabilitas politik dan ekonomi setelah merdeka membuat ketidakpastian politik dalam pembangunan ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk berkontribusi secara efektif di ASEAN.

Untuk bergabung ke Asean Timor Leste juga perlu menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan dan prosedur yang ada di ASEAN seperti mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan ASEAN ke dalam hukum negara dan kebijakan domestik. Kapasitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan guna memenuhi standar ASEAN. Untuk masuk ke Asean sendiri diperlukan pengakuan serta dukungan dari anggota ASEAN lain. Di mana pasti ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Seperti negara Thailand serta Myanmar yang mungkin tidak setuju atau memiliki keraguan. Walaupun negara ini tidak secara langsung menolak tapi negara-negara ini memiliki keraguan yang terkait dengan kesiapan Timor Leste untuk mempengaruhi kriteria keanggotaan penuh. Situasi politik yang ada di Myanmar dan ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri juga mempengaruhi sikap Myanmar terhadap keanggotaan Timor Leste. Negara yang mendukung keanggotaan Timor Leste adalah Indonesia Malaysia, Filipina dan juga Kamboja. Dan yang akan dibahas artikel ini tentang Kamboja yang mendukung Timor Leste dalam keanggotaan Asean(Mangku, Ariestu and Ardy, 2023).

Dukungan dari Kamboja seperti pada Tahun 2022 saat Kamboja sebagai ketua ASEAN ia mengakui Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN dan memberikannya status pengamat. Dan ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam proses integrasi Timor Leste ke dalam ASEAN. Kamboja juga turut mendukung Timor Leste di dalam forum forum ASEAN seperti dalam KTT ASEAN yang di mana isu-isu terkait akses dan integrasi Timor Leste dibahas Kamboja pun berkomitmen guna membantu Timor Leste memenuhi persyaratan untuk keanggotaan penuh. Bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya Kamboja diharapkan dapat berkontribusi dalam inisiatif yang dirancang guna mengurangi kesenjangan pembangunan diantara negara-negara anggota termasuk juga Timor Leste dengan dukungan dalam kapasitas pembangunan, pendidikan serta kerjasama ekonomi. Kamboja juga turut berperan dalam memfasilitasi program pendidikan serta pelatihan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Timor Leste dan merupakan salah satu area penting untuk mendukung integrasi Timor Leste ke dalam ASEAN.(Areas Juga pada tahun 2021 Timor Leste

mengambil sikap abstain untuk sebuah resolusi PBB yang mengutuk ketidaktoran militer di Myanmar dan hal ini dipengaruhi oleh Kamboja serta Cina. Tindakan ini pun menunjukkan bahwa Kamboja memiliki pengaruh dalam membentuk posisi Timor Leste di forum internasional sehingga berdampak pada dukungan untuk keanggotaan ASEAN (Mateev, 2023).

KESIMPULAN

Dukungan Kamboja terhadap Timor Leste dalam upayanya untuk bergabung dengan ASEAN selama satu dekade menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integrasi regional dan solidaritas antar negara Asia Tenggara. Kamboja, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Sen, secara konsisten dalam upaya menyuarakan pentingnya keanggotaan Timor Leste yang tidak hanya memperkuat posisi politik Kamboja di ASEAN tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi kedua Negara. Keputusan untuk mendukung Timor Leste mencerminkan pemahaman bahwa stabilitas dan kemakmuran di kawasan sangat bergantung pada kerjasama yang erat antar Negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Dengan bergabungnya Timor Leste, ASEAN dapat memperluas cakupan geografis dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan budaya. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam proses penerimaan, dukungan dari negara-negara anggota seperti Indonesia, Malaysia, dan Kamboja dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif. Namun, penting bagi Timor Leste untuk terus mempersiapkan diri agar dapat memenuhi kriteria keanggotaan penuh. Dukungan Kamboja harus diikuti dengan upaya konkrit dari Timor Leste untuk mengatasi tantangan internal yang ada. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan kedua negara tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. *et al.* (2024) 'Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 " Menilik Isu Kewarganegaraan : Dinamika Perkembangan Global pada Era IDENTITAS NASIONAL KAMBOJA : WARISAN BUDAYA KHMER DAN Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 " Menilik Isu K', pp. 284–287.
- Aminatus Sholeha, K. and Erasiah (2024) 'Kamboja Dan Integrasi Ekonomi Regional : Peluang Di Kawasan Asean', *Jurnal Senja : Sejarah dan Sosial Humaniora*, 2(2), pp.

- 50–67. Available at: <https://doi.org/10.36761/jssh.v2i2.4301>.
- Arafat, M.R. (2023) ‘Pengadilan hibrida sebagai upaya peacebuilding pasca runtuhnya kekuasaan khmer merah di kamboja’, *Uir Law Review*, 7(2), pp. 1–12.
- Budiana, M. (2013) ‘Politik Dan Pemerintahan Serta Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kerajaan Kamboja’, *Jurnal Online Westphalia*, 12(2), pp. 365–378.
- Daffa, A.A., Putri, D.O. and Ambarwati, E.D. (no date) ‘Pendahuluan mempertimbangkan daripada asas kepastian hukum dan asas keadilan . mengenai nilai-nilai daripada keadilan , dan memiliki kemanfaatan . Dalam masalah keadilan , permasalahan bagaimana keadilan dapat dituangkan disuatu perlindungan untuk memasti’.
- Dupont, A. (2000) ‘ASEAN’s response to the East Timor crisis’, *Australian Journal of International Affairs*, 54(2), pp. 163–170. Available at: <https://doi.org/10.1080/713613510>.
- Funan, K., Sejarah, A.M. and Hall, K.R. (2022) ‘Dan Transisi Politik Berdasarkan Catatan’, 7(2), pp. 12–20.
- Galateya, F.A., Alchatib, S.R. and Damayanti, C. (2023) ‘Hubungan Bilateral Singapura - Timor Leste Pasca Penolakan Keanggotaan Timor Leste di ASEAN’, *Jurnal Alternatif- Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 14(1). Available at: <https://doi.org/10.31479/jualter.v14i1.56>.
- Gede, D. and Mangku, S. (2017) ‘the Efforts of República Democrática De Timor-Leste (Timor Leste) To Be a Member of Association of Southeast Asian Nations (Asean) and Take an Active Role in Maintaining and Creating the Stability of Security in Southeast Asia’, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), pp. 16–26. Available at: <http://asean.org/timor-leste-to-show->.
- Hidayatti, D. (2020) ‘of Pursuing Cultural Beauty : Menelusuri Motivasi Pengunjung Wisata Religi Den Bach Ma , Hanoi’, 3(1), pp. 3–13.
- Hijriani, K. (2010) ‘Kemerdekaan Timor Leste Tahun 1999’, pp. 1–144.
- Indrawan, J. (2021) ‘Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik’, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), pp. 172–185. Available at: <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3830.172-185>.
- Kasetsiri, C. (2013) ‘Masa depan kerajaan di Kamboja 1’, *Kyoto Review of Southeast Asia Issue*, 13(13), pp. 1–6.

- Khotimah, S.K. and Yuliati, Y. (2022) 'Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII - XIV', *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 4(2), pp. 128–133. Available at: <https://doi.org/10.31540/sindang.v4i2.1122>.
- Leite, I.G. (2007) 'Re-evangelisasi: tantangan gereja di timor leste dewasa ini'.
- Lestari, W.P. (2009) 'Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009', *Core.Ac.Uk*, pp. 1–194.
- Lubis, D.E., Muhajir, A. and Zaini Dahlan (2021) 'Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal di India', *Islamic Education*, 1(2), pp. 41–46. Available at: <https://doi.org/10.57251/ie.v1i2.49>.
- Mahendra, M.A., Yuniarti Rusadi, E. and Dzakhiruddin, M. (2022) 'Kemerdekaan Timor Portugis sebagai The New World Order Portugal', *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(1), pp. 21–28. Available at: <https://doi.org/10.35905/almaarief.v4i1.2590>.
- Mangku, D.G.S., Ariestu, I.P.D. and Ardy, S.N. (2023) 'Membership Status of Timor Leste: Becoming A Member of ASEAN'. Available at: <https://doi.org/10.4108/eai.1-6-2023.2341369>.
- Mateev, I.G. (2023) 'East Timor and Asean', *KNOWLEDGE – International Journal*, 57(1), pp. 221–227.
- Muslim-thai, P.I.M. (2022) 'Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman', 12, pp. 119–132.
- Narawaty, D. (2023) 'Pergeseran Dan Pemertahanan Bahasa Di Timor-Leste: Suatu Kajian Sociolinguistik', *Pujangga*, 9(1), p. 108. Available at: <https://doi.org/10.47313/pujangga.v9i1.2568>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020) '濟無No Title No Title No Title', *Journal GEEJ*, 7(2).
- Putro, Z.A.E. (2014) 'Buddhisme Theravada di Asia Tenggara: Tradisi, Negara dan Modernisasi', *Harmoni*, 13(2), pp. 197–201.
- Rahayu, M.P. et al. (2024) 'Peluang Dan Ancaman Perdagangan Bebas Negara Asean Komoditi Pertanian : Studi Kasus Indonesia Dan Kamboja', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 01(04), pp. 892–900.
- Rahmayana, Y., Enawaty, E. and Hadi, L. (2021) '3 1,2,3', 2(2), pp. 25–32.
- Risal, M. (2017) 'Dinamika Keamanan Maritim Indonesia Pasca Kemerdekaan Timor Leste',

Jurnal Interdependence, 5(1), pp. 37–49.

Suartika, T. (2015) ‘Korban Jajak Pendapat di Timor Timur’, *Avatara. e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(1), pp. 15–24.

Sukmana, W.J. (2021) ‘Metode Penelitian Sejarah. Jakarta’, *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(April), pp. 1–4.

Syahbuddin (2020) ‘Proses Dekolonisasi Republik Demokratik Timor-Leste dan Keterlibatan Indonesia’, *Jurnal Pendidikan Ips*, 10(2), pp. 108–120. Available at: <https://doi.org/10.37630/jpi.v10i2.376>.

Syidad, A.W. (2023) ‘Islamisasi di Wilayah Indochina’, *ANNUR: Jurnal Studi Islam*, 15(1), pp. 137–152. Available at: <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.426>.